

PEMERINTAH KOTA BANJAR

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**



**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 diperlukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 211);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 42);
 23. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 33);
 24. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA-PD adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah periode tahun 2023.

Pasal 2

Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran.

BAB II PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 3

- (1) Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (2) Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah; dan

BAB IV : Penutup;

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada setiap dokumen Perubahan RENJA-PD Tahun 2023.

Pasal 5

Perangkat Daerah penyusun dokumen Perubahan RENJA-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Inspektorat Daerah;
26. Kecamatan Purwaharja;
27. Kecamatan Langensari;
28. Kecamatan Pataruman; dan
29. Kecamatan Banjar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Agustus 2023
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

SONI HARISON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini pada dasarnya merupakan amanat dari:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan

dan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini.

Banjar, 07 Agustus 2023

Kepala BPKPD,



ASER MULYANA, S.E

NIP. 19761004 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2023	8
2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	20
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Program dan Kegiatan	28
BAB IV : PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banjar
- Tabel 2.2 : Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023
- Tabel 3.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) BPKPD Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kota Banjar Tahun 2023 telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan. Berpedoman pada dokumen RKPD-P Tahun 2023 tersebut, telah disusun pula dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Implementasi rencana pembangunan Tahun 2023 telah berlangsung selama 1 (satu) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

5. Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
6. Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun Perubahan Renja PD Tahun 2023, sehingga dalam proses penyusunannya, PD memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar tahun 2013-2019;
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018–2023;
37. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
39. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;

40. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a);
41. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18.b Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
42. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022;
43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
45. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tahun 2023 adalah untuk:

1. Adanya keterkaitan dan korelasi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan program pembangunan;
2. Menjamin pemanfaatan sumber daya secara terukur, efektif dan efisien;
3. Terciptanya sinkronisasi, sinergitas dan integritas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dengan maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar adalah tersedianya dokumen perencanaan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar periode 1 (*satu*) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

2.2 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Memuat uraian tentang perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal perubahan RKPD dan Renja

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah, mencakup urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Banjar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN						
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02				KEUANGAN												
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300 %	95 %	100 %	102 %	102 %	100 %	100 %	67,3 %	264,7 %	88,2 %	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	98 %	98 %	100 %	100 %	48 %	246,6 %	82,2 %	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok	6 Dok	63 %	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok		3 Dok	60 %	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok		3 Dok	60 %	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	5 Dok	100 %	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok		3 Dok	60 %	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Lap	5 Lap	9 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	8 Lap	7 Lap	20 Lap	78 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap		4 Lap	4,00 Lap	4,00 Lap	4 Lap	4 Lap	2 Lap	6 Lap	63 %
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300 %	98 %	100 %	98 %	98 %	100 %	100 %	61,0 %	257,0 %	85,7 %
30 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/Bln	50 Orang/Bln	50 Orang/Bln	55 Orang/Bln	55 Orang/Bln	55 Orang/Bln	53 Orang/Bln	53 Orang/Bln	160 Orang/Bln	100 %
5 02 01 2.02 02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Orang	32 Orang							32 Orang	100 %
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dok	392 Dok	350 Dok	332 Dok	332 Dok	350 Dok	350 Dok	90 Dok	814 Dok	77 %
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	5 Lap	60 %
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 Lap	12 Lap							12 Lap	33 %
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300 %	100 %				100 %	100 %	100 %	200 %	67 %
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	1 Dok							1 Dok	33 %
5 02 01 2.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Lap	6 Lap							6 Lap	33 %
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	4 Lap							4 Lap	33 %
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300 %	68 %	100 %	92 %	92 %	100 %	100 %	33,3 %	193,5 %	64,5 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	4 Paket	1 Paket			4 Paket	80 %
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dok	50 Dok							50 Dok	100 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	154 Dok	50 Dok	50 Dok	55 Dok	55 Dok	50 Dok	53 Dok		105 Dok	68 %
5 02 01 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100 Orang	87 Orang	87 Orang				87 Orang	%
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	0 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	10 Orang			5 Orang	19 %
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	53,0 %	253,0 %	84,3 %
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	30 Paket 75 %
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	30 Paket 75 %
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	30 Paket 75 %
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	30 Paket 75 %
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	3 Paket	1 Paket	2 Paket	26 Paket 69 %
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	324 Dok	84 Dok	120 Dok	120 Dok	120 Dok	108 Dok	66 Dok	66 Dok	270 Dok	71 %
5 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Lap	9 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	27 Lap 67 %
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	30 Lap 75 %
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dok	30 Dok 75 %
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 %	100 %	100 %	129 %	129 %	100 %	100 %	129,5 %	358,0 %	119 %
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Paket	30 Paket							30 Paket	75 %
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	49 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit	10 Unit	18 Unit	18 Unit	82 Unit	104 %
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82 Unit	28 Unit	14 Unit	15 Unit	15 Unit	14 Unit	11 Unit	11 Unit	54 Unit	66 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4				
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	250 %	83,3 %		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	30 Lap	75 %		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	6 Lap	30 Lap	75 %		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	63,0 %	263,0 %	87,7 %		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	29 Unit	34 Unit	102 Unit	100 %	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	82 Unit	96 Unit	96 Unit	96 Unit	81 Unit	60 Unit	238 Unit	116 %	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Gdg	5 Gdg	5 Gdg	5 Gdg	5 Unit	2 Unit	2 Unit	10 Unit	60 %
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	9 Unit	150 %	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %	99 %	100 %	95 %	95 %	100 %	100 %	43 %	237,2 %	79,1 %
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	300 %	100 %	100 %	80 %	80 %	100 %	100 %	20,0 %	200 %	66,7 %
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	4 Dok	67 %	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	4 Dok	67 %	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	140 Dok	40 Dok	50 Dok	30 Dok	30 Dok	50 Dok	30 Dok	70 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	140 Dok	80 Dok	50 Dok	30 Dok	30 Dok	50 Dok	30 Dok	110 Dok	79 %	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	180 Dok	40 Dok	50 Dok	30 Dok	30 Dok	50 Dok	30 Dok	100 Dok	56 %	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	140 Dok	40 Dok	50 Dok	30 Dok	30 Dok	50 Dok	30 Dok		70 Dok	50 %	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2 Dok	4 Dok	12 Dok	100 %
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2 Dok		8 Dok	67 %
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	1 Dok								1 Dok	100 %
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	300 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	49,4 %	246,7 %	82,2 %	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	216 Dok	72 Dok	72 Dok	73 Dok	73 Dok	72 Dok	76 Dok	36 Dok	181 Dok	75 %	
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Lap	1 Lap							1 Lap	33 %	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	560 Dok	240 Dok	160 Dok	160 Dok	160 Dok	160 Dok	78 Dok	58 Dok	458 Dok	77 %	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45 Dok	12 Dok	16 Dok	16 Dok	16 Dok	12 Dok	11 Dok	9 Dok	37 Dok	64 %	
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9 Dok	3 Dok							3 Dok	33 %	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN						
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4					
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108 Lap	36 Lap	48 Lap	48 Lap	48 Lap	60 Lap	10 Lap	6 Lap	90 Lap	81 %	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	45 Dok	14 Dok							14 Dok	31 %	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	114 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	19 Dok	95 Dok	75 %
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	8 Dok	67 %
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	80 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	80 Orang	60 Orang	60 Orang	80 Orang	200 Orang	78 %
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68,8 %	268,8 %	89,6 %
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	72 Lap	24 Lap	25 Lap	25 Lap	25 Lap	13 Lap	25 Lap	6 Lap	55 Lap	72 %	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	243 Lap	81 Lap	81 Lap	81 Lap	81 Lap	82 Lap	85 Lap	78 Lap	240 Lap	83 %	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 Dok	67 %
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	9 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	9 Dok	100 %
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	9 Dok	3 Dok								3 Dok	33 %
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	0								0 Orang	0 %
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,3 %	233,3 %	77,8 %
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	48 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	3 Lap	1 Lap	0 Lap	32 Lap	67 %
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	0 Lap	2 Lap	67 %
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	0 Lap	32 Lap	67 %
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Management Aset	300 %	100 %	100 %	114,3 %	114,286 %	100 %	100 %	37,6 %	251,9 %	84,0 %	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	300 %	100 %	100 %	114,3 %	114,286 %	100 %	100 %	37,6 %	251,9 %	84,0 %	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	9 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	1 Dok		4 Dok	44 %
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 Dok	67 %
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Lap	16 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	2 Lap	4 Lap		20 Lap	167 %
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	65 Lap	30 Lap	20 Lap	40 Lap	40 Lap	40 Lap	20 Lap	70 Lap	15 Lap	85 Lap	131 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	27 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	5 Dok	23 Dok	78 %
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	3 Lap	6 Lap	1 Lap	11 Lap	67 %
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap		3 Lap	50 %
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %	106 %	100 %	96 %	96 %	100 %	100 %	28,6 %	231,0 %	77,0 %
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %	106 %	100 %	96 %	96 %	100 %	100 %	28,6 %	231,0 %	77,0 %
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	0 Dok	4 Dok	67 %
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	7 Dok	47 %
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	4 Lap	1 Lap	1 Lap	3 Lap	67 %
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	275 Unit		275 Unit	275 Unit	275 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	276 Unit	100 %
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	1 Lap	4 Lap		8 Lap	67 %
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap			2 Lap	67 %
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60 Obyek Pajak		20 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak			10 Obyek Pajak	17 %
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dok	8 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	3 Dok	1 Dok	13 Dok	54 %
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4560 Layanan	1600 Layanan	1520 Layanan	1520 Layanan	1520 Layanan	1520 Layanan			3120 Layanan	68 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERUBAHAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN			
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
													8=(7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13= 12/4		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		2 Dok	67 %
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	2 Dok	67 %
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		2 Dok	67 %
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok	2 Dok	67 %
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	3 Lap		2 Lap	67 %

Penjelasan Tabel 2.1:

- **Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak mencapai target adalah:**
Sejauh ini kegiatan dan sub kegiatan masih dilaksanakan sehingga belum ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target.
- **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

➤ **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Sejauh ini tidak ada kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target.

➤ **Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:**

Sejauh ini kegiatan dan sub kegiatan masih dilaksanakan sehingga belum ada kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target.

- **Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:**
Koordinasi yang baik antar unit kerja di BPKPD Kota Banjar yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Program (Perencana) dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan Sub Bagian Keuangan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD:**
Terdapat beberapa sub kegiatan yang harus disesuaikan/dihapuskan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, serta terdapat prioritas sub kegiatan karena penyesuaian anggaran. Hal ini tentu berdampak terhadap pencapaian target kinerja Renstra BPKPD akan kurang maksimal.

- **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:**
Penyesuaian kembali antara output sub kegiatan dengan rencana anggaran kegiatan sehingga hasil yang akan dicapai dapat maksimal.

2.2 Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Perubahan disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Banjar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Anggaran yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 pada BPKPD Kota Banjar adalah sebesar Rp 76.412.001.920,00. Perbandingan antara Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran menjadi Rp 76.607.982.535,00.

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023
Kota Banjar

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN	BPKPD			76.412.001.920,00	KEUANGAN	BPKPD			76.607.982.535,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	9.864.285.960,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	9.868.317.575,00	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.023.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.023.000,00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.947.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.947.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	-	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	-	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.942.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	1.942.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	-	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap	4.134.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap	4.134.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4.000.000,00	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.258.908.320,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.258.900.635,00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bln	7.235.017.620,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bln	7.235.009.935,00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dok	16.266.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dok	16.266.000,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	7.624.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	7.624.700,00	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	39.222.500,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	39.222.500,00	
01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	39.222.500,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok	39.222.500,00	

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	8.023.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	8.023.800,00	
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	
02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53 Dok	8.023.800,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	53 Dok	8.023.800,00	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	-	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	353.765.850,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	464.886.750,00	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.536.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.250.000,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.783.950,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.783.950,00	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	17.111.100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	26.875.500,00	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.157.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.709.600,00	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	71.466.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	71.466.700,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dok	6.630.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dok	6.630.000,00	
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12.335.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12.335.000,00	
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	120.126.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	182.216.000,00	
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	23.620.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	23.620.000,00	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	279.804.950,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	279.804.950,00	
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	237.804.950,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	237.804.950,00	
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	42.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	42.000.000,00	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.463.833.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.341.290.300,00	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	788.644.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	666.102.000,00	
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	675.188.300,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	675.188.300,00	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	442.704.440,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	458.165.640,00	

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	304.721.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	304.721.000,00	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	55.260.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	55.260.000,00	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.730.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.730.000,00	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	31.993.440,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	47.454.640,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	65.538.522.635,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	65.538.522.635,00	
01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	946.386.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	946.386.700,00	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	116.790.500,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	116.790.500,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	111.184.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	111.184.500,00	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	99.018.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	99.018.000,00	
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	99.068.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	99.068.000,00	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	95.484.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	95.484.000,00	
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	61.614.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dok	61.614.000,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	191.063.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	191.063.000,00	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	172.164.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	172.164.700,00	
02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	411.723.100,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	426.723.100,00	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dok	101.560.600,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dok	101.560.600,00	
02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dok	60.087.100,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dok	60.087.100,00	
03	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dok	104.881.750,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11 Dok	119.881.750,00	

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Lap	35.868.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Lap	35.868.000,00	
05	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dok	60.420.050,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dok	60.420.050,00	
06	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	9.725.800,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	9.725.800,00	
07	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	39.179.800,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	39.179.800,00	
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	275.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	275.000.000,00	
01	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25 Lap	47.052.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25 Lap	47.052.000,00	
02	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	85 Lap	144.589.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	85 Lap	144.589.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	75.706.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	75.706.000,00	
04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	7.653.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	7.653.000,00	
04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	63.905.412.835,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	63.905.412.835,00	
01	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	59.032.833.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	59.032.833.000,00	
02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	2.271.150.835,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	2.271.150.835,00	
03	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Lap	2.601.429.000,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Lap	2.601.429.000,00	

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Management Aset	100%	373.054.750,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	423.276.750,00	
01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	373.054.750,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	423.276.750,00	
01	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	70.087.800,00	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	70.087.800,00	
02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	6.418.650,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	6.418.650,00	
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Lap	155.509.500,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Lap	155.509.500,00	
04	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Lap	67.121.600,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70 Lap	117.343.600,00	
05	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9 Dok	41.622.200,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9 Dok	41.622.200,00	
06	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Lap	28.604.300,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Lap	28.604.300,00	
07	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lap	3.690.700,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lap	3.690.700,00	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	636.138.575,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	762.865.575,00	
01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	636.138.575,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	762.865.575,00	
01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok	7.588.100,00	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok	7.588.100,00	
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	72.432.950,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	72.432.950,00	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Lap	51.230.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Lap	51.230.000,00	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	82.088.800,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	82.088.800,00	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Lap	9.752.875,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Lap	9.752.875,00	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Lap		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Lap		
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak		-
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dok	73.993.250,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dok	73.993.250,00	
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1520 Layanan		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1520 Layanan		-
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dok		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dok		-

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dok	302.788.000,00	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dok	429.515.000,00	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	-	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dok	36.264.600,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dok	36.264.600,00	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Lap	-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Lap	-	

Sub kegiatan rutin yang memerlukan tambahan anggaran digunakan untuk penunjang operasional badan agar tetap berjalan lancar, berikut rinciannya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan urusan yang memerlukan tambahan anggaran digunakan untuk koordinasi, percepatan pencapaian output serta insentif PAD. Program/kegiatan/sub kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan BPKPD mencakup urusan/ program/ kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Penyusunan program dan kegiatan pada BPKPD Kota Banjar yang direncanakan dalam Renja BPKPD Kota Banjar mengacu pada:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan:
 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :

Rumusan Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh BPKPD terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;
 2. Dalam perumusan program dan kegiatan berorientasi terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain meliputi:
 1. Jumlah Program sebanyak 4 Program dengan 14 kegiatan dan 66 sub kegiatan;
 2. Lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKPD Kota Banjar
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPDP
Pagu anggaran perubahan pada BPKPD Kota Banjar sesuai dengan RKPDP Perubahan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 76.412.001.920,00.

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	KEUANGAN				94.887.292.489,00	76.412.001.920,00	-18.475.290.569,00	0,00	0,00	-18.475.290.569,00	81.919.069.095,88	APBD	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	22.109.362.421,00	9.864.285.960,00	-12.245.076.461,00	0,00	0,00	-12.245.076.461,00	11.105.285.595,88	APBD	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	44.000.000,00	18.023.000,00	-25.977.000,00	0,00	0,00	-25.977.000,00	26.126.000,00	APBD	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	10.000.000,00	7.947.000,00	- 2.053.000,00			- 2.053.000,00	7.947.000,00	APBD	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	5.000.000,00		- 5.000.000,00			- 5.000.000,00	2.649.000,00	APBD	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	3.000.000,00		- 3.000.000,00			- 3.000.000,00	2.792.000,00	APBD	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	3.500.000,00	1.942.000,00	- 1.558.000,00			- 1.558.000,00	1.942.000,00	APBD	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	3.500.000,00		- 3.500.000,00			- 3.500.000,00	2.662.000,00	APBD	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap	8 Lap	15.000.000,00	4.134.000,00	- 10.866.000,00			- 10.866.000,00	4.134.000,00	APBD	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			-	4.000.000,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	18.660.822.901,00	7.258.908.320,00	- 11.401.914.581,00	0,00	0,00	- 11.401.914.581,00	7.787.421.883,38	APBD	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bln	53 Orang/Bln	18.631.910.901,00	7.235.017.620,00	- 11.396.893.281,00			- 11.396.893.281,00	7.755.885.183,38	APBD	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dok	350 Dok	23.912.000,00	16.266.000,00	- 7.646.000,00			- 7.646.000,00	23.912.000,00	APBD	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	2 Lap	5.000.000,00	7.624.700,00	2.624.700,00			2.624.700,00	7.624.700,00	APBD	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	42.357.000,00	39.222.500,00	-3134500,00	0,00	0,00	-3.134.500,00	46.222.500,00	APBD	
01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	3 Dok	42.357.000,00	39.222.500,00	- 3.134.500,00			- 3.134.500,00	46.222.500,00	APBD	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	167.815.000,00	8.023.800,00	-159.791.200,00	0,00	0,00	-159.791.200,00	156.215.000,00	APBD	
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	88.815.000,00	-	- 88.815.000,00			-88.815.000,00	82.215.000,00	APBD	
02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50 Dok	53 Dok	14.000.000,00	8.023.800,00	- 5.976.200,00			- 5.976.200,00	14.000.000,00	APBD	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	-	- 65.000.000,00			- 65.000.000,00	60.000.000,00	APBD	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	537.693.500,00	353.765.850,00	-183.927.650,00	0,00	0,00	-183.927.650,00	542.012.312,50	APBD	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	21.500.000,00	19.536.000,00	- 1.964.000,00			- 1.964.000,00	41.212.500,00	APBD	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.501.500,00	57.783.950,00	2.282.450,00			2.282.450,00	60.673.147,50	APBD	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6 Paket	25.000.000,00	17.111.100,00	- 7.888.900,00			- 7.888.900,00	28.219.275,00	APBD	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.500.000,00	25.157.100,00	2.657.100,00			2.657.100,00	46.945.080,00	APBD	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	181.930.000,00	71.466.700,00	- 110.463.300,00			- 110.463.300,00	86.014.110,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 Dok	66 Dok	9.120.000,00	6.630.000,00	- 2.490.000,00			- 2.490.000,00	13.923.000,00	APBD	
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	10.000.000,00	12.335.000,00	2.335.000,00			2.335.000,00	14.700.000,00	APBD	
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	182.438.000,00	120.126.000,00	- 62.312.000,00			- 62.312.000,00	219.136.000,00	APBD	
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	12 Dok	29.704.000,00	23.620.000,00	- 6.084.000,00			- 6.084.000,00	31.189.200,00	APBD	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	326.270.000,00	279.804.950,00	-46465050,00	0,00	0,00	- 46.465.050,00	320.595.000,00	APBD	
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	18 Unit	262.410.000,00	237.804.950,00	- 24.605.050,00			- 24.605.050,00	276.395.000,00	APBD	
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	11 Unit	63.860.000,00	42.000.000,00	- 21.860.000,00			- 21.860.000,00	44.200.000,00	APBD	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.543.113.020,00	1.463.833.100,00	-79.279.920,00	0,00	0,00	-79.279.920,00	1.463.833.100,00	APBD	
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	799.194.720,00	788.644.800,00	- 10.549.920,00			- 10.549.920,00	788.644.800,00	APBD	
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	743.918.300,00	675.188.300,00	- 68.730.000,00			- 68.730.000,00	675.188.300,00	APBD	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	787.291.000,00	442.704.440,00	- 344.586.560,00	0,00	0,00	- 344.586.560,00	762.859.800,00	APBD	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	29 Unit	407.455.000,00	304.721.000,00	- 102.734.000,00			- 102.734.000,00	344.015.000,00	APBD	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	81 Unit	66.700.000,00	55.260.000,00	- 11.440.000,00			- 11.440.000,00	89.197.500,00	APBD	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	273.970.000,00	50.730.000,00	- 223.240.000,00			- 223.240.000,00	273.970.000,00	APBD	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	39.166.000,00	31.993.440,00	- 7.172.560,00			- 7.172.560,00	55.677.300,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	71.017.926.068,00	65.538.522.635,00	-5.479.403.433,00	0,00	0,00	-5.479.403.433,00	69.236.683.500,00	APBD	
01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	1.000.000.000,00	946.386.700,00	- 53.613.300,00	0,00	0,00	- 53.613.300,00	1.102.500.000,00	APBD	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	131.845.000,00	116.790.500,00	- 15.054.500,00			- 15.054.500,00	132.630.750,00	APBD	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	129.468.000,00	111.184.500,00	- 18.283.500,00			- 18.283.500,00	128.427.600,00	APBD	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dok	30 Dok	110.374.000,00	99.018.000,00	- 11.356.000,00			- 11.356.000,00	112.737.555,00	APBD	
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dok	30 Dok	110.374.000,00	99.068.000,00	- 11.306.000,00			- 11.306.000,00	112.737.555,00	APBD	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dok	30 Dok	67.208.000,00	95.484.000,00	28.276.000,00			28.276.000,00	102.358.200,00	APBD	
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dok	30 Dok	67.208.000,00	61.614.000,00	- 5.594.000,00			- 5.594.000,00	68.880.000,00	APBD	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dok	2 Dok	207.606.000,00	191.063.000,00	- 16.543.000,00			- 16.543.000,00	245.736.750,00	APBD	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dok	2 Dok	175.917.000,00	172.164.700,00	- 3.752.300,00			- 3.752.300,00	198.991.590,00	APBD	
02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	400.000.000,00	411.723.100,00	11.723.100,00	0,00	0,00	11.723.100,00	740.210.100,00	APBD	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	72 Dok	76 Dok	93.000.000,00	101.560.600,00	8.560.600,00			8.560.600,00	231.000.000,00	APBD	
02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	160 Dok	78 Dok	46.292.000,00	60.087.100,00	13.795.100,00			13.795.100,00	66842100,00	APBD	
03	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dok	11 Dok	88.900.000,00	104.881.750,00	15.981.750,00			15.981.750,00	175.000.000,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60 Lap	10 Lap	27.880.000,00	35.868.000,00	7.988.000,00			7.988.000,00	37.368.000,00	APBD	
05	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dok	38 Dok	60.400.000,00	60.420.050,00	20.050,00			20.050,00	100.000.000,00	APBD	
06	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	4 Dok	53.900.000,00	9.725.800,00	- 44.174.200,00			- 44.174.200,00	30.000.000,00	APBD	
07	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	60 Orang	29.628.000,00	39.179.800,00	9.551.800,00			9.551.800,00	100.000.000,00	APBD	
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	400.000.000,00	275.000.000,00	- 125.000.000,00	0,00	0,00	- 125.000.000,00	296.581.400,00	APBD	
01	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Lap	25 Lap	65.000.000,00	47.052.000,00	- 17.948.000,00			- 17.948.000,00	21.581.400,00	APBD	
02	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Lap	85 Lap	214.000.000,00	144.589.000,00	- 69.411.000,00			- 69.411.000,00	170.000.000,00	APBD	
03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	87.000.000,00	75.706.000,00	- 11.294.000,00			- 11.294.000,00	85.000.000,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	3 Dok	34.000.000,00	7.653.000,00	- 26.347.000,00			- 26.347.000,00	20.000.000,00	APBD	
04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	69.217.926.068,00	63.905.412.835,00	-5312513233,00	0,00	0,00	- 5.312.513.233,00	67.097.392.000,00	APBD	
01	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	1 Lap	62.422.603.000,00	59.032.833.000,00	- 3.389.770.000,00			- 3.389.770.000,00	59.032.833.000,00	APBD	
02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	1 Lap	4.751.436.446,00	2.271.150.835,00	- 2.480.285.611,00			- 2.480.285.611,00	5.000.000.000,00	APBD	
03	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Lap	16 Lap	2.043.886.622,00	2.601.429.000,00	557.542.378,00			557.542.378,00	3.064.559.000,00	APBD	
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Management Aset	100%	100%	535.904.000,00	373.054.750,00	- 162.849.250,00	0,00	0,00	- 162.849.250,00	750.000.000,00	APBD	
01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	535.904.000,00	373.054.750,00	- 162.849.250,00	0,00	0,00	- 162.849.250,00	750.000.000,00	APBD	
01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dok	1 Dok	109.537.800,00	70.087.800,00	- 39.450.000,00			- 39.450.000,00	200.000.000,00	APBD	
02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	10.745.850,00	6.418.650,00	- 4.327.200,00			- 4.327.200,00	25.000.000,00	APBD	
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Lap	4 Lap	82.319.300,00	155.509.500,00	73.190.200,00			73.190.200,00	100.000.000,00	APBD	
04	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	20 Lap	70 Lap	184.507.800,00	67.121.600,00	- 117.386.200,00			- 117.386.200,00	200.000.000,00	APBD	
05	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9 Dok	9 Dok	70.582.300,00	41.622.200,00	- 28.960.100,00			- 28.960.100,00	100.000.000,00	APBD	
06	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	6 Lap	64.586.300,00	28.604.300,00	- 35.982.000,00			- 35.982.000,00	100.000.000,00	APBD	
07	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lap	2 Lap	13.624.650,00	3.690.700,00	- 9.933.950,00			- 9.933.950,00	25.000.000,00	APBD	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	1.224.100.000,00	636.138.575,00	- 587.961.425,00	0,00	0,00	- 587.961.425,00	827.100.000,00	APBD	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN						PERKIRAAN MAJU		KET		
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/BERKURANG				PAGU ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN			
							APBD KOTA	BANPROV	APBN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	1.224.100.000,00	636.138.575,00	-	587.961.425,00	0,00	0,00	-	587.961.425,00	827.100.000,00	APBD	
01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	98.171.000,00	7.588.100,00	-	90.582.900,00			-	90.582.900,00	15.000.000,00	APBD	
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	36.428.000,00	72.432.950,00		36.004.950,00				36.004.950,00	80.000.000,00	APBD	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Lap	1 Lap	72.561.000,00	51.230.000,00	-	21.331.000,00			-	21.331.000,00	65.000.000,00	APBD	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	1 Unit	135.867.000,00	82.088.800,00	-	53.778.200,00			-	53.778.200,00	135.000.000,00	APBD	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Lap	4 Lap	33.517.000,00	9.752.875,00	-	23.764.125,00			-	23.764.125,00	42.500.000,00	APBD	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Lap	1 Lap	14.291.000,00		-	14.291.000,00			-	14.291.000,00		APBD	
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	23.989.100,00		-	23.989.100,00			-	23.989.100,00		APBD	
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	3 Dok	112.135.000,00	73.993.250,00	-	38.141.750,00			-	38.141.750,00	75.000.000,00	APBD	
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1520 Layanan	1520 Layanan	18.510.000,00		-	18.510.000,00			-	18.510.000,00		APBD	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dok	1 Dok	21.146.250,00		-	21.146.250,00			-	21.146.250,00		APBD	
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	4 Dok	361.085.650,00	302.788.000,00	-	58.297.650,00			-	58.297.650,00	310.000.000,00	APBD	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	15.804.000,00		-	15.804.000,00			-	15.804.000,00	104.600.000,00	APBD	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dok	3 Dok	105.454.000,00	36.264.600,00	-	69.189.400,00			-	69.189.400,00		APBD	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Lap	3 Lap	175.141.000,00		-	175.141.000,00			-	175.141.000,00		APBD	

Penjelasan Tabel 3.1:

1. Pengurangan pagu di Sekretariat paling besar pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Hal itu dikarenakan pembayaran iuran jaminan kesehatan PNS, iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, iuran jaminan kematian PNS yang tadinya dipusatkan di BPKPD menjadi tersebar ke masing-masing Perangkat Daerah;
2. Pengurangan pagu anggaran di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah tersebar di semua sub kegiatan;
3. Penambahan pagu anggaran di Bidang Perbendaharaan Daerah tersebar di semua sub kegiatan;
4. Pengurangan pagu anggaran di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersebar di semua sub kegiatan;
5. Pengurangan pagu anggaran di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terbesar di semua sub kegiatan;
6. Pengurangan pagu anggaran di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebar di semua sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKPD Kota Banjar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota Banjar

**“DENGAN IMAN DAN TAQWA KITA WUJUDKAN KOTA BANJAR
YANG BERSIH PEMERINTAHANNYA, SEJAHTERA MASYARAKATNYA,
ASRI LINGKUNGANNYA MENUJU BANJAR AGROPOLITAN”**

dan mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Banjar Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKPD Kota Banjar yang memuat kebijakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Banjar. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKPD Kota Banjar.

Program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BPKPD Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di BPKPD.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. BPKPD Kota Banjar berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

- b. BPKPD berkewajiban menyusun laporan evaluasi Renja setiap triwulan sebagai fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pencapaian target Renstra dan Renja BPKPD;
- c. BPKPD berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang bertujuan mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya, serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengawasan DPRD.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana

Banjar, 07 Agustus 2023

Kepala BPKPD,

